

Abstrak

Myanmar memiliki keragaman etnis dan pluralitas agama. Dari perspektif geografis, sekitar satu setengah dari negara terdiri dari wilayah yang secara tradisional dikuasai oleh etnis Burma (Bama), yang membentuk 65% dari bangsa yang berpenduduk 50 juta. Sebuah gambaran yang rumit dari agama yang berbeda kesetiaan juga muncul. Buddhisme berinteraksi dengan Islam, Hindu dan Kristen. Semula keadaan ini dianggap biasa. Tetapi, kemudian ternyata menjadi potensi konflik yang berkepanjangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa belum terselesaikannya ketegangan etnis dan keagamaan ini merupakan ancaman yang besar pemerintah militer Myanmar, termasuk keberadaan Daw Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi yang meneriakkan pemberlakuan Hak Asasi Manusia untuk Myanmar. Tetapi, yang jauh lebih rumit adalah keberadaan kaum Rohingya yang selama ini terpinggirkan karena dianggap sebagai ancaman yang serius. Bukan saja dari sisi budaya, tetapi lebih jauh dari sekadar persoalan budaya, pemerintah dan mayoritas masyarakat Myanmar menganggapnya sebagai ancaman politik yang sangat membahayakan kepentingan Negara dan bangsa Myanmar yang didominasi oleh kekuatan umat Buddha dan rejim otoritarian yang tidak toleran dengan beragam bentuk perbedaan.

Kata Kunci: Rohingya, Islam dan Buddhisme.

Ifititah

Permasalahan keragaman agama dan etnis di banyak negara telah mengakibatkan berbagai persoalan, utamanya menyangkut upaya sebuah negara untuk menyatukan visi bersama berbasis keadilan. Sebagaimana negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, permasalahan keragaman agama dan etnis telah membawa Myanmar ke dalam kancah pergolakan yang hingga kini tidak kunjung usai. Gelombang protes, disebabkan oleh ketidakadilan bermunculan, minimal ditandai oleh gelombang protes pada tahun 1998 dan 2007 yang menciptakan luka yang mendalam pada beberapa kelompok perlawanan, yang antara lain mengatasnamakan HAM. Meskipun akar permasalahannya adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian besar kelompok etnis yang merasa dizalimi oleh sekelompok etnis yang dominan di negara itu.

Etnis Burma yang mendominasi di Myanmar, karena di samping jumlah mereka yang lebih banyak daripada kelompok-kelompok etnis yang lain, telah menguasai berbagai bidang kehidupan di negara itu. Dan pada akhirnya, secara politis, mereka pun mendominasi. Dominasi kelompok etnis Burma yang pada umumnya beragama budha terhadap kelompok etnis yang lain telah melahirkan praktik politik yang dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan oleh kelompok-kelompok etnis yang lain, termasuk di dalamnya kelompok etnis-muslim yang menempati posisi minoritas. Berbagai kebijakan yang tidak adil itulah yang kemudian ditengarai sebagai sebab utama yang memicu perpecahan di Myanmar, yang hingga kini tak kunjung usai.

Selintas Mengenal Myanmar

Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.

Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh. Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Pada tahun 1989 Myanmar sebagai nama Negara Junta Militer yang berkuasa di negara itu. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer merubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional.

Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan "Burma" untuk merujuk kepada negara tersebut. PBB, yang mengakui hak negara untuk menentukan nama negaranya, menggunakan Myanmar, begitu pula dengan

Perancis dan Jerman. Di Jerman, kementerian luar negeri menggunakan Myanmar, tetapi hampir seluruh media Jerman menggunakan Burma. Pemerintah AS, yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan Burma tetapi mayoritas media besar seperti The New York Times, CNN dan Associated Press menggunakan Myanmar. Pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. Pada 2005, pemerintah membangun ibu kota baru, bernama Naypyidaw.

Pembagian Administratif

Secara administratif, Myanmar dibagi menjadi tujuh negara bagian (*pyine*) dan tujuh divisi (*yin*). Divisi mayoritas dihuni etnis Bamar, sementara negara bagian mayoritas dihuni etnis-etnis minoritas tertentu. Setiap negara bagian dan divisi kemudian dibagi lagi menjadi distrik-distrik.

Negara-negara bagian di Myanmar meliputi:

1. Negara Bagian Chin
2. Negara Bagian Kachin
3. Negara Bagian Kayin (Karen)
4. Negara Bagian Kayah (Karenni)
5. Negara Bagian Mon
6. Negara Bagian Rakhine (Arakan)
7. Negara Bagian Shan

Sementara Divisi-divisinya, meliputi:

1. Divisi Irrawaddy
2. Divisi Bago

3. Divisi Magway
4. Divisi Mandalay
5. Divisi Sagaing
6. Divisi Tanintharyi
7. Divisi Yangon

Kelompok-kelompok Etnis di Myanmar

Secara garis besar kelompok etnis (di) Myanmar dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok etnis:

1. Etnis Bamar/Burma. Dua pertiga dari total warga Myanmar. Beragama Buddha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan.
2. Etnis Karen. Suku yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Memperjuangkan otonomi selama 60 tahun. Menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.
3. Etnis Shan. Etnis yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.
4. Etnis Arakan. Juga disebut Rakhine, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat.
5. Etnis Mon. Etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.
6. Etnis Kachin. Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di Cina dan India.
7. Etnis Chin. Kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India.

8. Etnis Rohingya. Etnis Muslim yang tinggal di utara Rakhine, banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand.

Gelombang Protes di Myanmar

Meski terkenal sebagai Negara pelanggar HAM, Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang. Ketika Indonesia bungkam dengan gerakan bawah tanah di era Soeharto, gelombang protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan tentara bersenjata demi kudeta militer.

Sejak awal masa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. *The State Peace and Development Council's (SPDC's)* Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat bulan lalu pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM. Protes massa Myanmar memang tak segaduh Amerika yang liberal. Dimana-mana rezim militer masih memegang kendali sosial. Asia Times mencatat, gerakan protes umumnya mulai dalam jumlah kecil dan tersebar. Beberapa bulan terakhir ini misalnya, protes kecil dan damai terus berkelanjutan di ibukota Yangon. Namun kemarahan publik ini bisa berubah menjadi efek bola salju dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola salju ini pecah, maka perlahan akan kembali menggumpal. Beberapa hari setelah

kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, New York

Times mencatat gerakan ini malah berdo'a untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku. Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan *Union Solidarity and Development Association (USDA)*. *USDA* tercatat sering bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyi di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut memakan korban simpatisan *National League for Democracy (NLD)* sebagai gantinya. "Anggota kelompok ini (*USDA*) dilatih khusus untuk mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan," kata seorang Diplomat barat di Yangon pada *Asia Times*. Dunia Barat mencurigai gerakan ini berada dalam sayap yang sama dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang terjadi sangat sulit untuk diliput oleh para jurnalis, termasuk jurnalis internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para kriminal. Seiring bertambahnya anggota *USDA*, sekurangnya 600 kriminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota *USDA* diperkirakan mencapai 2000 orang. *USDA* berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Bhuda yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi *88 Generation Student* ini didirikan oleh penyair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski berlabel pelajar, *Generation 88*

kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Buddha. “Kami percaya tak satupun warga Myanmar yang rela menerima aksi kekerasan politik junta militer,” kata salah satu pemimpin *Generation 88* Htay Kywe pada *Asia Time*. Dan dalam setiap protes massa Myanmar hampir bisa dipastikan *USDA* dan *Generation 88* berperang di dalamnya.

Gelombang protes, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1988, terjadi lagi di Myanmar pada tahun 2007. Protes gelombang kedua dimotori oleh para biksu Budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolakan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar.

Akar Permasalahan Gelombang Protes

Etnis Burma, berasal dari Tibet, merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Namun, etnis Burma adalah kelompok yang datang belakangan di Myanmar, yang sudah lebih dahulu didiami etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai). Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, juga dekat perbatasan dengan Thailand.

Sebagaimana terjadi di banyak negara, di antara tiga etnis utama di Myanmar ini terjadi perang. Satu sama lain silih berganti menjadi penguasa di daerah yang dinamakan Burma, kini Myanmar. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885. Ada juga etnis lain di Myanmar, yang kemudian turut meramalkan ketegangan politik sebelum penjajahan dan pasca-penjajahan Inggris. Misalnya, ada etnis Rakhine, yang lebih lebih dekat ke Bangladesh.

Saat penjajahan, berbagai kelompok etnis ini berjuang untuk mengakhiri penjajahan. Setelah penjajahan berakhir dan merdeka pada tanggal 4 Januari 1948, makin terjadi kontak lebih ramah antara etnis Burma dan semua etnis non-Burma.

Kebijakan Burmaisasi

Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, bersama U Nu adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pemimpin negara. Akan tetapi, pada tahun 1962, militer yang didominasi etnis Burma mengambil alih kekuasaan negara. Ne Win adalah otak di balik kudeta itu. Cikal bakal junta militer

sekarang (disebut sebagai Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan/*SPDC*) berasal dari kekuasaan Ne Win itu. *SPDC* sendiri didominasi oleh etnis Burma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai *Golden Triangle* (Segitiga Emas). Burma memilih cara apa pun untuk mencegah hal itu terjadi. Sejak 1960-an, terjadilah diaspora warga Myanmar. Berbagai warga Myanmar dari kelompok etnis kini tinggal di Thailand, Bangladesh, Cina, Laos, dan India. Semua negara ini berbatasan langsung dengan Myanmar.

Kemenangan kubu demonstrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pemilu tahun 1990, tak dikehendaki oleh kelompok etnis Burma. Kubu Suu Kyi dan etnis non-Burma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan Suu Kyi pun dihadang. Kekuasaan direbut. Beginilah yang terjadi seterusnya dan seterusnya.

Mencermati Posisi Minoritas Muslim

Myanmar, sebagaimana negara-negara tetangganya, memiliki persoalan yang sama mengenai keragaman etnisitas dan religiusitas di wilayahnya. Sebagaimana Thailand dan Filipina, kaum minoritas menjadi bagian yang terpinggirkan oleh kebijakan negara yang lebih berpihak kepada kelompok etnis dan keagamaan mayoritas. Tidak terkecuali nasib umat Islam di tengah mayoritas umat Buddha. Agama Islam yang pertama kali hadir di Myanmar pada tahun

1055, hingga kini masih menjadi kaum pinggiran. Hasil jerih-payah para saudagar Arab yang beragama Islam yang mendarat di delta Sungai Ayeyarwady,

Semenanjung Tanintharyi, dan Daerah Rakhin dengan upaya dakwah mereka, kini baru menuai hasil sebagai sebuah entitas yang keberadaannya tetap dicurigai dan bahkan sebagian dintimidasi karena dianggap berpotensi sebagai kekuatan yang membahayakan junta militer Myanmar dan mengancam eksistensi kaum mayoritas Buddha di wilayah itu. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina dan Persia sebagai sebuah peristiwa sejarah penting di wilayah itu. Mereka pada umumnya memandang bahwa umat Islam akan menjadi kekuatan yang semestinya tidak dicurigai, karena mereka datang bukan sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai bagian dari komunitas sipil yang mengharapkan perlakuan adil dari semua pihak. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhin dan Shan. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya, dikarenakan banyaknya umat Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Tapi, populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941.

Sebagian besar Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar dan tentara. Beberapa di antaranya juga bekerja sebagai penasihat politik Kerajaan Burma. Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina. Koloni muslim Persia di Myanmar ini tercatat di buku *Chronicles of China* di 860. Umat muslim asli Myanmar disebut Pathi

dan muslim Cina disebut Panthay. Konon, nama Panthay berasal dari kata Parsi. Kemudian, komunitas muslim bertambah di daerah Pegu, Tenasserim, dan Pathein. Tapi komunitas muslim ini mulai berkurang seiring dengan bertambahnya populasi asli Myanmar. Pada abad ke-19, daerah Pathein dikuasai oleh tiga raja muslim India.

Pada zaman Raja Bagan yaitu Narathihpate (1255-1286), pasukan muslim Tatar pimpinan Kublai Khan dan menguasai Nga Saung Chan. Kemudian, pasukan Kublai Khan ini menyerang daerah Kerajaan Bagan. Selama peperangan ini, Kolonel Nasrudin juga menguasai daerah Bamau. Salah satu kelompok etnis yang beragama Islam di wilayah itulah adalah Rohingya. Sebuah kelompok etnis-muslim yang oleh junta militer Myanmar tidak diakui sebagai bagian dari komunitas etnis yang sah di wilayah itu. Sehingga mereka terusir di beberapa Negara sebagai kelompok pengungsi dan manusia-perahu. Mereka antara lain tersebar menjadi pendatang liar di Thailand, Myanmar, Srilangka bahkan ada sebagian dari kelompok mereka yang 'terdampar' di Aceh (Indonesia) sebagai kelompok manusia-perahu.

Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri merupakan sebuah negara bagian seluas 14.200 mil persegi yang terletak di barat Myanmar. Merupakan daerah pesisir timur teluk bengali yang bergunung-gunung. Berbatasan langsung dengan India di utara, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di Timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di barat laut. Saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta penduduk yang

terdiri dari dua etnis utama, Rohingya yang Muslim dan Rakhine/Maghs yang beragama Buddha.

Kata Rohingya berasal dari kata Rohang, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Etnis Rohingya sudah tinggal di Arakan sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan bantahan bagi junta militer yang menyatakan, bahwa etnis Rohingya merupakan pendatang yang di tempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh. Memang secara fisik etnis Rohingya memiliki kesamaan fisik dengan orang Bangladesh. Merupakan keturunan dari campuran orang bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu dan Arab menyebabkan kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar. Termasuk dari segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi, Urdu dan Bengali.

Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Buddha dan Muslim. Pada 1203 M Bengal menjadi sebuah negara Islam, dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk ke wilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M Arakan menjadi sebuah negara Muslim. Selama 350 tahun kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1784 M raja Boddaw Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya.

Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Ketika perang ini berakhir pada 24 Februari 1826 yang ditandai dengan diratifikasinya perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah

British-India. Lalu dengan Government of India Act. tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937. Melalui keputusan ini pula di gabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma merdeka pada tahun 1948

Penduduk Muslim Rohingya merupakan mayoritas penduduk di Arakan, dengan jumlah kurang lebih 90 persen. Namun selama 49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar) jumlah itu terus berusaha dikurangi, mulai dari pengusiran hingga pembunuhan, hingga saat ini hanya tersisa sedikit umat Islam Rohingya di selatan Arakan sedangkan di bagian utara Rohingya masih menjadi mayoritas.

Pada saat bangsa Burma lainnya merayakan kemerdekaan pada tahun 1948, Umat Islam Rohingya justru seakan dikucilkan dari kegembiraan itu. Hal ini ditandai dengan tidak diundanginya satu pun perwakilan Umat Islam Rohingya saat perjanjian penyatuan Burma di tanda tangani pada 12 September 1947 di Pinlong, negara bagian Shan antara Jenderal Aung San (Ayah tokoh pro Demokrasi Aung San Su Kyi) dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk menggabungkan diri setelah 10 tahun, Etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini.

Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, etnis Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayahnya (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhin yang beragama Buddha, walaupun populasinya kurang dari 10 persen penduduk Arakan. Sejak saat itulah hak-hak etnis Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi Buddha Burma.

Bahkan semenjak junta militer menguasai Burma keadaan semakin memburuk, bukan saja hak-hak politis yang dikekang, tetapi juga dalam bidang sosial-budaya, hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingya pada tahun 1965 oleh junta.

Bentuk-Bentuk Kekejaman Junta Militer Terhadap Muslimin Rohingya antara lain:

1. Penolakan Pemberian Kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan. Hal ini menyebabkan Junta memiliki pembenaran untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya, akibatnya lebih dari setengah populasi Rohingya diusir dari Arakan. Kebanyakan saat ini hidup di pengungsian di Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Arab Saudi (termasuk Indonesia, ingat kasus manusia perahu Rohingya sebanyak 50 orang yang terdampar di Aceh 2 atau 3 tahun lalu). Efek lainnya adalah perubahan demografis penduduk Arakan, dari tadinya 90 persen Muslim menjadi hanya 30 persen atau hanya sekitar 1,5 juta dari 5 juta penduduk, sedangkan sisanya adalah orang Rakhine (Buddha) dari luar Arakan yang sengaja ditempatkan di Arakan.

2. Pembatasan Untuk Berpindah. Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar saat ini menghadapi problem yang sangat pelik, berupa larangan berpergian bagi mereka dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi keluar desa mereka harus mendapat izin dari otoritas lokal, yang tentu saja sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu etnis Rohingya di Arakan utara telah dimasukkan ke dalam camp konsentrasi yang tidak memungkinkan mereka untuk berpergian dan menjadikan mereka sebagai pekerja paksa.
3. Pembatasan Dalam Kegiatan Ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ saja, pihak Junta juga menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, sedangkan di sisi lain Junta menrapkan pajak yang sangat tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik etnis Rohingya saat ini telah di sita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak.
4. Pembatasan Dalam Bidang Pendidikan. Dalam bidang pendidikan hal yang sama juga diterapkan oleh junta. Anak-anak etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Myanmar dan pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Myanmar.
5. Pembunuhan, Penahanan dan Penyiksaan. Pihak Junta telah melakukan kekejaman lainnya yaitu berupa pembunuhan etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan etnis Rohingya. Selain itu penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan, ratusan etnis Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya tiap

tahunnya. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian etnis Rohingya.

6. Kerja Paksa. Pihak Junta juga telah memperkerjakan kelompok etnis Rohingya dengan tanpa mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Hak-hak mereka sebagai kaum pekerja telah dirampas dengan sikap otoriter.
7. Pengusiran Etnis Rohingya dari desa mereka.
8. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan bukan hal yang asing lagi di Arakan ketika tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah etnis Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak mereka. Pengaduan terhadap perlakuan ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan dibunuh. Di sisi lain pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah.
9. Kerusakan anti Rohingya. Pihak junta sengaja memicu kerusakan di berbagai wilayah Arakan secara periodik dalam rangka melenyapkan etnis ini dari Myanmar, akibatnya ribuan etnis Rohingya tewas secara mengenaskan dan psoperti mereka juga hancur. Dengan cara ini pihak junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Buddha yang telah dibayar oleh junta untuk membunuh etnis Rohingya.
10. Penghancuran. Ratusan Masjid dan Madrasah telah dihancurkan oleh pihak junta, bahkan Al Qur'an dalam banyak kasus dibakar dan diinjakinjak oleh tentara sedangkan kitab-kitab tentang Islam disita dan

dijadikan sebagai bahan pembungkus. Pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah.

Kesepuluh poin tersebut hanya sebagian dari kejahatan pihak junta terhadap kaum Muslimin Rohingya, yang pada saat ini jumlahnya di Myanmar diperkirakan sebesar 2 juta orang dan sebanyak 1,5 juta diantaranya tinggal di Arakan. Sebanyak 600.000 tinggal di Bangladesh, 350.000 di Pakistan, 400.000 di Saudi Arabia dan 100.000 di Uni Emirat Arab, Thailand dan Malaysia. (<http://www.annah.com>)

Junta Militer Myanmar mempunyai kebijakan untuk berpihak kepada kelompok mayoritas, dan sementara meminggirkan kelompok minoritas, baik dalam arti (mayoritas-minoritas) etnis maupun keagamaan. Mereka lakukan tindakan politis 'terus-terang' untuk meninggalkan kelompok minoritas, bahkan lebih dari itu memojokkan mereka menjadi kelompok peinggiran yang teralienasi, tidak terkecuali kepada kelompok etnis-muslim.

Menghadapi kelompok etnis-muslim, junta militer Myanmar, mewakili kelompok mayoritas etnis-Budhha, cenderung bertindak represif. Kelompok etnis-muslim yang dalam data statistik tidak resmi berjumlah 13 persen dari kelompok etnis non-Buddha (sementara data resmi dari pemerintah Myanmar mengakui hanya 3 persen), ditemukan sedikitnya terdiri empat kelompok.

Kelompok yang paling besar adalah Rakhine (Rohingya). Jumlah mereka sekitar satu juta. Kelompok ini kebanyakan tidak mempunyai keabsahan sebagai warga Negara Myanmar. Hukum Kewarganegaraan Myanmar's (1982) mempersyaratkan mereka yang memohon keabsahan sebagai warga Negara

Myanmar untuk membuktikan bahwa nenek moyangnya berasal dari Myanmar, sementara mereka tidak dapat membuktikannya. Sehingga mereka dianggap bukan warga Negara Myanmar.

Sementara itu, kelompok etnis-muslim yang sementara ini banyak yang menjadi warga negara Myanmar, pada umumnya adalah mereka yang mengalami konversi agama; yaitu Orang Birma yang berkonversi ke dalam Islam (Orang-Islam Bama Orang Islam), dan juga beberapa Orang Islam dari kelompok etnis-India yang tinggal di Myanmar sejak zaman kolonial, dan juga mereka yang berdarah campuran Birma-India, Pashu atau Moken (penduduk kepulauan Andaman, atau dikenal jugasebagai Orang Laut dalam bahasa Melayu) di samping para pendatang yang tinggal untuk sementara waktu di Myanmar. (<http://www.kompas.com>)

Khatimah

Di dalam rekayasa sosialnya, junta militer Myanmar memilih kebijakan yang didasarkan pada kepentingan etnisitas dan agama mayoritas. Patut dicatat, bahwa apa yang terjadi di Myanmar, yang mengakibatkan krisis multi-etnis dan agama adalah ketiadaan dialog politik yang egaliter. Sehingga dalam pandangan beberapa pengamat, Myanmar dianggap gagal melakukan rekayasa sosial yang berpihak kepada semua kelompok etnis dan agama yang ada di wilayah itu, termasuk di dalamnya, mereka gagal untk menciptakan dialog yang adil dengan kelompok etnis-muslim yang hingga saat ini masih merasakan adanya kebijakan yang timpang dari junta militer Myanmar.

Oleh karena ini, bisa juga dikatakan bahwa Myanmar telah gagal membuat kebijakan komprehensif, karena lekatnya kebijakan parsial yang berpijak pada semangat etnis-kegamaan mayoritas yang cenderung menindas, termasuk kepada kelompok etnis muslim.

Lebih lanjut, Myanmar dianggap sebagai Negara yang anti-demokrasi dan kurang peduli terhadap hak-hak asasi manusia, karena perlakuan tidak adilnya kepada kelompok-kelompok minoritas.

Kapan perubahan itu akan terjadi di Myanmar, banyak pengamat yang pesimis. Karena sikap tertutup junta militer Myanmar yang hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya gejala perubahan kebijakan untuk menyikapi kelompok etnis-keagamaan minoritas di negara itu. Apalagi, menurut sebagian pengamat, mereka (Junta Militer Myanmar) masih meyakini bahwa kebijakan yang tidak adil itu merupakan kebijakan yang asih layak untuk dipertahankan. Dan bahkan, jika otokrasi dan kebijakan hegemonik itu secara struktural dan kultural masih berlangsung di Myanmar, maka mengharapkan adanya "Kesatuan Myanmar Sejati" yang berpihak kepada semua kelompok etnis-keagamaan adalah sesuatu yang *absurd*. Dan oleh karenanya harapan kelompok etnis-muslim untuk mendapatkan keadilan dari Junta Militer Myanmar, dengan kebijakan barunya, masih akan tetap menjadi mimpi panjang.

Yogyakarta, 13 Januari 2013